

PERAN KARTOSOEWIRJO DALAM PEMBENTUKAN NEGARA ISLAM INDONESIA 1947-1962

Aga Itbah Baihaki
agaitbah@gmail.com

Abstract: The purpose of this research is to find out about Kartosoewirjo's struggle in the formation of the Indonesian Islamic State in 1947-1962 in Malangbon, West Java. There are several problems examined in this paper, namely: 1) How is the biography of S.M. Kartosoewirjo 2) How was the condition of the government of the Republic of Indonesia which triggered the emergence of the Kartosoewirjo resistance movement 3) How was Kartosoewirjo's struggle in the formation of the Islamic State of Indonesia. To study this problem, researchers use historical methods, to find out historical facts about the biography of SM Kartosoewirjo and his struggles in forming the Islamic State of Indonesia. To analyze historical facts using approaches that are often used in historical research, namely historical, normative, and political approaches. This study found: 1) S.M. Kartosoewirjo was born on January 7, 1907. His father, Kartosuwirjo, was an orderly who was appointed as an employee by the Dutch, so that Kartosuwirjo could complete the education that Kartosuwirjo had received at the Dutch government at that time. 2) The struggle of a Kartosoewirjo to establish an Islamic state, by calling for Jihad Fi Sabilillah for its goals. Kartosuwirjo gave confidence and lessons about his understanding in government, a country based on the Koran and Hadith. 3) In a historical record in Indonesia, Kartosoewirjo was a rebel against the government of the republic of Indonesia.

Keywords: *Kartosoewirjo, thought, Islamic state, Indonesia*

PENDAHULUAN

Pada tahun 1945 awal kemerdekaan Indonesia yang menjadi persoalan dasar negara merupakan isu pada masa itu, dimana para pengikut Islam menganjurkan Islam sebagai suatu dasar negara di Indonesia. Pemikiran tentang ide dasar negara Islam sebenarnya upaya pencarian kekuatan intelektual bagi manfaat dan suatu peran negara sebagai untuk merealisasikan ajaran agama Islam. Pemikiran kenegaraan Islam merupakan ijtihad politik dalam rangka menemukan nilai-nilai Islam dan proses politik yang sedang berlangsung (Din, 1993: 4).

Sebelum Indonesia merdeka, keputusan untuk mendirikan suatu negara Islam oleh Kartosoewirjo diambil dalam sidang Komite Pembela Kebenaran Partai Serikat Islam Indonesia pada bulan maret 1940 di Malangbon. juga ditegaskan, karena proklamasi negara Islam Indonesia itu sebagai suatu reaksi terhadap persetujuan perjanjian Renville. Gerakan Kartosoewirjo pada mulanya disebut turut serta pada perjuangan kemerdekaan, tetapi akhirnya berkembang ke arah negatif, menjadi gerakan teroris

(Holk, 1995: 3). Sehingga sumber data yang penulis temukan baik dalam buku maupun arsip nasional, gerakan ini dianggap sebagai golongan pemberontak, namun dalam penelitian Hadi Sofyan fakta ini dianggap kebohongan oleh beberapa pihak termasuk diantaranya komunitas yang mengaku sebagai warga negara Islam Indonesia dan para simpatisannya. Pandangan Kartosoewirjo tentang kebangsaan sesuai dengan pandangan Tjokroaminoto yang menulis sebagai berikut:

“Islam itoelah tjita-tjita kita jang tertinggi, sedang nasionalisme dan patriotisme itoe ialah tanda-tanda hidoep kita sanggoep akan melakukan islam dengan seloeas-loeas dan sepenoeh-penoehnja. Pertama-tama adalah kita Moeslim, dan didalam ke Moesliman itoe adalah kita Nasionalist dan patriot, jang menoedjoe kemerdekaan negeri toempah darah kita tidak tjoema dengan perkataan-perkataan jang hebat dalam vergadering sadja, tetapi pada tiap-tiap saat bersedia juga mendjadikan korban sedjalan apa sadja jang ada pada kita untuk mentjari kemerdekaan negeri toempah darah kita.” (Holk, 1995: 15).

Selanjutnya beliau mengatakan Islam mempunyai konsepsi negara yang sangat jelas. Islam adalah agama dan negara. Ia juga berpandangan bahwa untuk menegakkan hukum-hukum Allah dimuka bumi wajiblah ada kekuasaan yang menjaminnya, kekuasaan itu adalah kekuasaan Islam dan pemerintah Islam (Kartosoewirjo, 1930: 515-516). Dalam pemahaman kelompok negara Islam Indonesia, kata itu diartikan dua negeri; negeri bathil dan negeri haq. Negeri bathil adalah negara republik Indonesia yang didirikan tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno dan Hatta dengan nama Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sedangkan negeri yang haq (benar) adalah negara yang didirikan oleh Kartosoewirjo, 7 Agustus 1949 dengan nama Negara Karunia Allah-Negara Islam Indonesia (NKA-NII) (Asep, 2011: 113-148).

Pada tahun 1947, terjadi serangan agresi militer pertama oleh Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia, sementara Soekarno dan Hatta ditangkap oleh Belanda. Yogyakarta sebagai ibu kota negara republik Indonesia berhasil dikuasai oleh Belanda dan Negara Kesatuan Republik Indonesia diganti menjadi Republik Indonesia Serikat buatan Belanda. Karena situasi politik nasional yang seperti ini dan republik Indonesiapun belum diakui oleh dunia luar. S.M. Kartosoewirjo tetap melawan Belanda dan kemudian karena kekosongan pemerintahan ini ia berijtihad memproklamasikan Negara Islam Indonesia pada tanggal 7 Agustus 1949 di Jawa Barat (Kartosoewirjo, 1930: 515-516). Dengan demikian Kartosoewirjo telah menyelamatkan Indonesia dari kolonial Belanda.

Pinardi dalam karyanya yang berjudul S.M Kartosoewirjo, ia mendeskripsikan kelompok Kartosoewirjo sebagai sosok pemberontak dengan ambisi tinggi mendirikan sebuah negara Islam dan mengungkap sisi gelap kelompok Kartosoewirjo yang melakukan usaha percobaan membunuh Presiden dan melakukan penyerangan terhadap masyarakat yang tidak mengakui Negara Islam Indonesia. Oleh sebab itu gerakan ini menimbulkan keresahan bagi rakyat Indonesia, namun bagi rakyat Malangbong gerakan ini menjadi pelindung bagi keselamatan masyarakat Jawa Barat terutama pada saat republik Indonesia menyetujui perjanjian Renville tanpa perlawanan. Di mana pihak republik Indonesia harus mengosongkan wilayah-wilayah yang dikuasai TNI untuk dikuasai oleh Belanda. sementara Kartosoewirjo memilih bertahan melakukan perlawanan bersenjata dan berjuang menyerukan Jihad dengan menggerakkan pasukan *Hizbu'llah* dan *sabi'lillah* yang merupakan cabang bersenjata terbesar dari partai besar Islam, Masyumi. Indonesia (Dijk, 1983: 11).

Kartosoewirjo memproklamkan berdirinya “Negara Islam Indonesia” dengan harapan bahwa suatu saat kelak negara ini akan mencakup seluruh wilayah Indonesia. Hingga timbul gerakan yang sama di Sulawesi Selatan, Aceh, Kalimantan dan Jawa Timur. selanjutnya menggabungkan diri dalam gerakan Kartosoewirjo. Namun gerakan-gerakannya ini memiliki motivasi yang berbeda-beda. Menurut penulis, meskipun gerakan ini memiliki tujuan lain, akan tetapi gerakan ini memiliki pengaruh yang cukup besar sehingga mampu menambah kekuatan untuk mempertahankan Negara Islam Indonesia ciptaan Kartosoewirjo.

Namun demikian, gagasan tentang pemberlakuan syariat Islam di Indonesia menjadi semakin baik oleh rezim orde lama maupun orde baru. Sangat ironi melihat kenyataan itu, karena republik Indonesia adalah negara mayoritas muslim terbesar di dunia (Ruslan, 2008: 4). Salah satu alasan mengapa Kartosoewirjo mendirikan sebuah negara Islam adalah sebagaimana dalam penjelasan QS. Ibrahim/14:24-25;

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ﴿٢٤﴾ تُؤْتِي أُكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ۚ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٥﴾

Artinya: “Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya (menjulang) ke langit.(Pohon) itu

menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat.(Ibrahim:24-25).

Menurut pemahaman kelompok Kartosoewirjo, sesuatu yang tidak mungkin dan sangat mustahil bila sebuah pohon memiliki akar yang busuk dan rapuh bisa menghasilkan buah yang baik. Bahkan tidak mungkin juga bila akarnya busuk bisa mempertahankan batangnya tetap berdiri kokoh. Begitu juga, tidak mungkin bila pohon berakar semangka bisa menghasilkan buah mangga. Maka, pemikiran yang rasional adalah bila pohon mangga dengan akar mangga pastilah akan menghasilkan buah mangga. Demikianlah sebuah negara, yakni bila akarnya (undang-undangnya) Islam, batangnya (negaranya) Islam, pastilah buahnya (umatnya) Islam (Asep, 2011: 31).

METODE

Penulisan ini menggunakan sosiologis dan pendekatan biografi. Pendekatan sosiologis digunakan untuk menggambarkan interaksi sosial yang terjadi dalam kehidupan, antara individu maupun golongan yang akan menimbulkan suatu dinamika kehidupan. Kedinamikaan dan perubahan sosial akan bermuara pada terjadinya mobilitas sosial. Pendekatan biografi merupakan penelitian biografi yang mempelajari seluk beluk seorang individu berkaitan dengan pengalamannya, sebagaimana diceritakan orang bersangkutan kepada peneliti, serta sumber-sumber lain yang relevan, seperti arsip dan dokumen, anggota keluarganya, dan lainnya.

Biografi digunakan untuk mendapatkan informasi tentang pengalaman pribadi, proses “menjadi”, dan karakter seorang tokoh (Kuntowijoyo, 2003: 171). Sebagaimana dijelaskan oleh Weber, tujuan penggunaan sosiologi adalah untuk memahami arti subjektif dari kelakuan sosial, bukan semata-mata menyelidiki arti objektifnya. Dari sini, tampaklah bahwa fungsionalisasi sosiologi mengarahkan pengkaji sejarah pada pencarian arti yang dituju oleh tindakan individual berkenaan dengan peristiwa-peristiwa kolektif sehingga pengetahuan teoretislah yang akan mampu membimbing sejarawan dalam menemukan motif-motif dari suatu tindakan atau faktor-faktor dari suatu peristiwa (Dudung, 2007: 23). Jadi, pendekatan sosiologi digunakan untuk mengetahui tujuan dari tindakan yang dilakukan oleh Kartosuwirjo, yang diteliti melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori peranan, teori peran adalah sebuah sudut pandang dalam sosiologi dan psikologi sosial

yang menganggap sebagian besar aktivitas harian diperankan oleh kategori-kategori yang ditetapkan secara sosial (misalnya ibu, manajer, guru).

Setiap peran sosial adalah serangkaian hak, kewajiban, harapan, norma, dan perilaku seseorang yang harus dihadapi dan dipenuhi. Model ini didasarkan pada pengamatan bahwa orang-orang bertindak dengan cara yang dapat diprediksikan, dan bahwa kelakuan seseorang bergantung pada konteksnya, berdasarkan posisi sosial dan faktor-faktor lain. Menurut teori peran dalam kajiannya terhadap hubungan antar manusia ini, sebenarnya dalam pergaulan sosial itu sudah ada skenario atau peran-peran yang telah disusun oleh masyarakat, yang mengatur apa dan bagaimana peran setiap orang dalam pergaulannya. Menurut teori ini, jika seorang mematuhi skenario, maka hidupnya akan harmonis, tetapi jika menyalahi skenario, maka ia akan dicemooh oleh "penonton" dan ditegur oleh "sutradara". Seperti halnya dengan Kartosoewirjo, jika ia mentaati skenarionya sebagai warga negara Indonesia, maka ia tidak akan mendapatkan hukuman dari pemerintah.

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan (Sugiyono, 2012: 2). Metode penelitian sejarah lazim juga disebut metode sejarah. Metode itu sendiri berarti jalan atau petunjuk. Lebih khusus lagi sebagaimana dikemukakan oleh Gilbert J Garraghan, metode penelitian sejarah adalah serangkaian aturan dan prinsip sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang efektif, menilainya secara kritis. Berdasarkan pengertian diatas, para ahli ilmu sejarah sepakat untuk menetapkan empat kegiatan pokok di dalam cara peneliti sejarah. istilah yang mereka gunakan berbeda-beda tetapi intinya sama. Ringkasnya, setiap langkah ini biasa disebut secara berurutan dengan: *heuristik*, kritik atau *verifikasi*, *aufassung* atau *interpretasi* dan *darstellung* atau *historiografi* (Dudung, 2007: 54).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi dan Karakteristik Kartosoewirjo

S.M. Kartosuwirjo sebuah nama gabungan dari namanya sendiri, ayah dan kakeknya. Nama aslinya adalah Sekarmadji, ayahnya Maridjan dan kakeknya KartoSuwirjo. Ayahnya seorang pegawai kraton dari kesultanan Solo. Seorang yang

paham sejarah, pekerjaannya sebagai petugas pemeliharaan barang-barang sejarah termasuk buku-buku sejarah yang ditulis oleh orang-orang zaman dahulu. Memang masih ada hubungan darah kesultanan, baik dengan kesultanan Solo maupun Demak. Sekarmaji Maridjan Kartosoewirjo begitu nama lengkap S.M. Kartosoewirjo. Ia dilahirkan di Cepu, pada Selasa Kliwon tanggal 07 Pebruari 1905 (Holk, 1995: 7).

Cepu merupakan daerah kecil antara Blora dan Bojonegoro, atau sebuah daerah perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur, sehingga mempunyai akulturasi budaya antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ayah beliau yaitu Maridjan Kartosoewirjo pada masa itu jabatannya disamakan dengan Sekertaris Distrik. Oleh sebab itu ayahnya memiliki kedudukan yang cukup penting sebagai seorang pribumi pada saat itu. Kartosoewirjo memiliki kakak perempuan yang tinggal di Surakarta pada tahun 50-an dan kakak laki-laki yang memimpin Serikat Buruh Kereta Api pada tahun 20-an, ketika itu di Indonesia terbentuk berbagai Serikat Buruh.

Dengan melihat pekerjaan ayahnya, Ia bukanlah terlahir dari keluarga ulama (lingkungan agamis), namun demikian karena posisi inilah ayah Kartosoewirjo memiliki kedudukan yang cukup penting sebagai seorang pribumi pada saat itu. Status inilah yang berpengaruh sangat besar terhadap pembentukan garis sejarah anaknya salah satunya dibuktikan dengan bisa bersekolah di sekolah Belanda. Ia sangat beruntung karena mendapat pendidikan yang formal yang mana pada saat itu jarang orang yang mendapatkannya. Keluarga Kartosoewirjo memang tergolong priayi feodal dan bukan pemeluk agama yang taat. Masa kecilnya pun tak akrab dengan pendidikan agama, Dia terus-menerus menempuh pendidikan di sekolah Belanda.

Pada tahun 1911, dalam usia 8 tahun Ia masuk sekolah angka II (*tweede inlandsche school*) atau sekolah rakyat, sekolah yang khusus di peruntukan bagi golongan pribumi di pamotan kabupaten Rembang Jawa Tengah, desa tempat tinggal orang tuanya. Setelah menamatkan sekolah yang di kenal sebagai “sekolah ongko loro (angka dua)” pada tahun 1915, Ia melanjutkan ke sekolah HIS di Rembang, di sekolah ini diajarkan bahasa Belanda dan bahasa-bahasa asing lainnya. Setelah itu dia meneruskan pendidikan ke *Europeesche Lagere School*, sekolah elite khusus anak Belanda dan warga pribumi yang mampu di Bojonegoro, Jawa Timur (Tempo, 2011: 2).

Di sekolah itu hanya orang pribumi yang cerdas dan berasal dari keluarga amtenar. Setelah lulus dari ELS, kartosoewirjo pada tahun 1923 pergi ke Surabaya dan mulai kuliah pada sekolah kedokteran NIAS (Nederlandsch Indische artsen school). Di tingkat tersebut dia mengikuti tingkat persiapan (Voorbereidende school) selama tiga tahun kemudian pada tahun 1926 dia memulai kuliah yang sebenarnya, tetapi setahun kemudian dia di keluarkan dari sekolah tersebut. Karena mempunyai buku-buku tentang sosialis komunis yang pada waktu itu telah terjadi pemberontakan-pemberontakan komunis akhir tahun 1926.

Di masa remajanya, S.M. kartosoewirjo mulai tertarik pada dunia pergerakan justru akrab dengan pemikiran kebangsaan, bahkan yang “kekirian”. Karena terpengaruh bacaan-bacaan yang diperoleh dari pamannya tentang sosialisme. Pamannya marko kartodikromo dikenal sebagai wartawan dan aktivis sarekat Islam beraliran merah. Kartosoewirjo mulai terjun ke dunia politik bergabung dengan Jong Java dan kemudian Jong Islamieten Bond.

Tentang pengetahuan Islamnya SM. Kartosuwiryo berbeda dengan tokoh-tokoh Islam lainnya yang mendapatkan pengetahuan tentang Islam melalui pendidikan pesantren/madrasah-madrasah. Maka beliau mendapatkannya dengan cara autodidak (belajar sendiri) dan sering berkonsultasi pribadi dengan ‘ulama-ulama’ yang konsekwen dan sholeh. Bermotivasi semangat Islam yang mengalir dalam dirinya yang ditanamkan orang tuanya semenjak kecil, beliau terus mempelajari dan mendalami Al Islam, melalui buku-buku yang ada pada saat itu. Kesibukan kuliahnya dalam bidang Ilmu Fisika yang cukup berat itu, tidak menghalangi dari usaha menggali Islam. Setelah dikeluarkannya dari NIAS, kesempatan mempelajari Al Islam semakin luas apalagi setelah tinggal dengan Pak Cokroaminoto, mulai tahun 1927-1929. Beliau juga banyak mewarisi sifat-sifat kepemimpinan Cokroaminoto, terutama dalam ketegasannya memegang prinsip kebenaran.

Pada tahun 1929 karena alasan kesehatan disamping tugas dari pimpinannya, terpaksa beliau harus berpisah dengan Cokroaminoto untuk pindah ke Jawa Barat. Kemudian bermukim di Malangbong, sebuah kota kecil dekat Garut dan Tasikmalaya. Disana beliau berguru pada ‘Ulama’ setempat antara lain Kyai Yusuf Tadjri dan Kyai Ardi Wisastro yang disebut belakangan ini disamping sebagai guru juga merangkap

sebagai mertuanya, sebab menikah dengan putrinya yang bernama Dwi Ummi Kalsum pada tahun 1929.

Kyai Ardi Wisastra adalah seorang Ulama di daerah Malangbong, disamping sebagai tokoh PSII terkemuka di daerah itu beliau juga seorang sufi, yang selalu berusaha membersihkan diri dari kotoran-kotoran dosa, dan meningkatkan martabat diri di hadapan Allah dengan melaksanakan amalan nawafil, disamping ibadah fardhu yang terbatas itu. Bidang inilah yang sangat menarik S.M. Kartosuwiryo, untuk mempelajari lebih dalam, sebab menurut pendapatnya untuk menjadi mujahid (pejuang Islam) yang baik, mesti dibutuhkan kebersihan jiwa dari penyakit-penyakit *riya*, *'ujub*, iri hati, syirik dan semacamnya. Bagaimana seseorang akan memperjuangkan berlakunya Islam untuk orang lain, sedangkan dirinya sendiri belum Islam secara konsekuen lahir dan bathin, apalagi untuk menjadi seorang pemimpin Islam harus mesti mempunyai sifat-sifat Warosatul Ambiya menjadi kekasih Allah (*Waliyullah*).

Kartosoewiryo mulai aktif di kancah politik pada saat ia bergabung dengan Jong Java. Organisasi ini pecah karena anggotanya yang lebih radikal memilih gerakan yang tidak terlalu mengagungkan tradisi Jawa dan pemikiran Barat. Mereka mendirikan Jong Islamieten Bond, yang lebih menyuarakan aspirasi Islam. Dan Kartosoewirjo ikut bergabung. Kartosoewirjo tidak pernah masuk pesantren, dia mempelajari Islam dari kiai-kiai secara serabutan kepada kiai yang dia temui. Sampai bertemu dengan H.O.S. Cokroaminoto dia menyatakan ingin menjadi muridnya hingga dia mondok di rumahnya. Disana dia berguru soal Islam dan politik.

Pada tahun 1929 “kursus” Ilmu politik dan Islam di rumah Tjokroaminoto selesai. Kartosoewirjo ditunjuk sebagai wakil partai Sarekat Islam Indonesia di Jawa Barat. Kartosoewirjo bekerja sama dengan Jepang dan mendirikan Masyumi, menolak segala perjanjian dengan Belanda. Lahir pada 7 Agustus 1945 Jepang merestui Masyumi dengan harapan kekuatan Islam dapat membantu dalam perang. Padahal para pendiri Masyumi seperti K.H. Wahid Hasyim, M. Natsir, Kartosoewirjo menginginkan organisasi ini dapat menghadirkan semangat Islam dalam perang kemerdekaan.

Sebelum terpilih sebagai komisaris Jawa Barat merangkap Sekretaris I Masyumi, dia sudah aktif dalam Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI), salah satu organisasi cikal

bakal Masyumi. Atas usulan Kartosoewirjo pada tanggal 7 November 1945 di Yogyakarta, Masyumi menjadi sebuah partai politik dan dia tetap menjadi sekretaris pertama. Programnya menciptakan negara hukum berdasarkan ajaran Islam. Dia juga mematangkan partai yang diharapkan menjadi wahana organisasi bagi semua kelompok Islam.

Kepribadian berasal dari kata pribadi yang berarti diri sendiri atau perorangan (Poerwardaminata, 1980: 572). Demikian pengertian kepribadian sebagaimana yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Hamka yaitu, Kumpulan sifat-sifat dan kelebihan diri yang menunjukkan kelebihan seseorang dari pada orang lain sehingga ada manusia besar dan manusia kecil. Ada manusia yang sangat berarti hidupnya dan tidak berarti sama sekali. Atau kumpulan sifat akal budi, kemauan dan cita-cita dan bentuk tubuh. Hal itu menyebabkan harga kemanusiaan seseorang berbeda dari yang lainnya (Hamka, 1982” 15). Sementara menurut Koentjaraningrat, Kepribadian adalah ciri seseorang individu yang konsisten, yang memberikan kepadanya identitas sebagai individu yang khusus (Koentjaraningrat, 1980: 104).

Kemal bekas tentara Darul Islam, mengatakan Kartosoewirjo di matanya adalah pribadi yang keras dan bijaksana. Dalam banyak kesempatan di markas, dia selalu memberikan pengajian dan tuntunan kepada anak buahnya. "Rujukannya Alquran. Selain mengajarkan agama, Kartosoewirjo menggelar latihan kemiliteran bagi laki-laki dan keterampilan khusus untuk perempuan. "Seperti jahit-menjahit,". Kepribadian Kartosoewirjo sangatlah menarik. Ia senantiasa hidup dalam suasana yang sederhana. "Sebagai seorang tamatan ELS dan 'potolan' sekolah dokter, sebenarnya ia bisa hidup cukup baik, kalau saja mislanya ia mau menjadi seorang pegawai pemerintah atau bekerja di suatu kantor perusahaan. Tetapi ia lebih memilih hidup selayaknya sesederhana mungkin, ia lebih cenderung ke politik dan terus saja memikirkan masalah yang menimpa bangsanya (Ruslan, dkk, 2008: 41).

Adapun sikap kepribadiannya dapat ditelaah dalam beberapa tulisan- tulisannya yang dimuat di harian Fadjar Asia tahun 1929-1930; (Chaidar, 1999: 71).

“Rasa kebangsaan ta’ada, keislaman poen demikian poelahnja, kendatipoen ia menoeroet titelnja mendjadi kepala agama Islam. Agama kebangsaan kita di tanah toempah darah ini. Bangsanja dibelakangkan dan bangsa lain diberi hak jang lebih dari batas jang soedah terang dan njata ialah: Boekan karena tjinta

bangsa dan tanah air, melainkan karena keperloean diri sendiri belaka, keperloean jang bersangkoetan dengan kesoenanannja”. “Semendjak zaman keradjaan Padjadjaran sampai ke zaman Browidjojo, maka jang boleh dianggap merdeka tjoema radjanja sadja. Tetapi rakjatnja sedjak zaman itoe sampai ini waktoe tetap tinggal dalam gelombang perhambaan dan perhinaan jang serendah-rendahnja dan sedalam-dalamnja”. “Orang-orang Lampoeng dipandang dan diperlakoekan sebagai monjet belaka, ialah monjet jang dioesir dari sebatang pohon ke sebatang pohon lainnja.” Katanja ada Madjlis ini dan Madjlis itoe, ada Volksraad ada Vinciale Raad dan Madjlis Negeri (Tweede Kamer) dan segalanja boeat melindoengi ra’jat boeat menertibkan keamanan dan keadilan. Tapi mana buktinya, tanya Kartosoewirjo. Bukankah ini semua: “omong kosong belaka?”.

Dalam kritikan ini Kartosoewirjo menyerang Sultan Solo pada saat resepsi ulang tahunnya yang ke-64, Sultan hanya memperhatikan wartawan-wartawan Belanda. Menurutnya, tidak ada perbedaan, siapa yang berkuasa, apakah itu pemerintah sendiri atau pemerintahan bangsa lain, hasilnya sama saja, yaitu bahwa rakyat tidak memiliki kemerdekaan. Ketika para petani kecil di Lampung diusir dari tanah miliknya oleh ‘kapitalis asing’, Kartosoewirjo menyerukan perlawanan: “Jangan berkeluh kesah, jangan meminta-minta! Jangan tinggal diam saja! Kalau takut mati jangan hidup! Kalau hendak hidup janganlah takut mati!” (Chaidar, 1999: 78).

Kartosoewirjo cukup dekat dengan Jepang. Dalam soeara MIAI, ia menulis betapa ajaran Islam akan berkembang bila umatnya ikut membangun dunia baru bersama “Keluarga Asia Timur Raya.” Kartosoewirjo menunjuk Kiai Haji Mochtar sebagai ketua umum dan Kartosoewirjo sebagai wakil ketua Masyumi daerah Priangan. Tokoh politik Islam setempat seperti, Isa anshari, Sanusi Partawidjaya, KH. Toda dan Kamran, masuk kepengurusan dalam pidatonya Kartosoewirjo meminta pengikutnya memahami ajaran Islam, menjaga persatuan, dan menghentikan konflik karena perbedaan ideology. “karena konflik sesama bangsa Indonesia hanya akan menguntungkan Belanda,” katanya ia mematangkan partai yang diharapkan menjadi wahana organisasi bagi semua kelompok Islam, sambil mempersiapkan tentaranya sendiri, lascar Hisbullah dan Sabilillah di priangan.

Semua menyaksikan Kartosoewirjo merupakan sosok berpengaruh keras hati. Sikap kerasnya pada persetujuan Renville mendorong Perdana Menteri Amir Sjarifuddin meminta Kartosoewirjo menjabat Menteri Pertahanan. Tapi dia menolak karena ia tak menyukai arah politik Amir yang condong kekiri. Ketika Masyumi

memegang pemerintahan, Natsir mengirimkan surat yang mengajaknya turun gunung, kembali berjuang dalam batas-batas hukum Negara yang ada. Namun Kartosoewirjo membalas surat Natsir dengan pahit, “Barangkali saudara belum menerima proklamasi (Darul Islam) kami“(Tempo, 2011: 31).

Kartosowirjo dikenal sebagai orang yang fanatik terhadap Islam dan kental dengan unsur Jawa tradisional. Sebagaimana orang Jawa, ia pun gemar melakukan tapa geni dengan cara *pati geni* (tidak makan, tidur, minum) selama 40 hari di gua walet, di sekitar gunung kidul. Sifat dan watak Kartosoewirjo yang sangat keras dalam mewujudkan setiap ambisinya, dengan pemahaman ajaran Islam yang ia peroleh membuatnya semakin yakin bahwa Islam adalah sebuah hukum yang memberikan kejayaan dan kedamaian. (Tempo, 2011: 62). Sang Imam yang sangat terkenal dengan kefanatikannya dalam agama itu, mempunyai keyakinan yang cukup tebal pada masalah mistik. Ia pernah, menganggap dirinya sebagai titisan dari Raden Patah penguasa Kerajaan Demak.

Perjuangan Pembentukan NII

Berdirinya negara Islam Indonesia pada tahun 1949

Pada tanggal 7 Agustus 1949 bertepatan dengan 12 Syawal 1368 H, bertempat di desa Cisampang, Kecamatan Cilugalar, Kawedanan Cisayong (Holk, 1995: 91). Tasikmalaya, Kartosoewirjo bersama para pengikutnya yang setia, seperti Ghazali Tusi, Sanusi Partawidjaja, R. Oni dan Toha Arsyad telah bertekad bulat memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia. Mereka pun mengeluarkan satu naskah proklamasi yang ditanda-tangani oleh sang Imam Kartosoewirjo. Lahirnya NII ini kemudian membawa dua program utama, yaitu menyadarkan manusia bahwa mereka hamba Allah dan wajib menegakkan *Khalifa fil Ardhi*. Disebutkan juga bahwa lahirnya NII bukan sekedar buatan manusia, melainkan perbuatan dan program langsung dari Allah. Maka dalam setiap pidatonya, Kartosoewirjo selalu memulainya dengan kalimat “Negara Karuni Allah” (Kholid, 2006: 99).

Negara adalah satu hal, sedang rakyat dan pemerintah adalah hal yang lain. Demikian juga dengan Republik Indonesia, walaupun negaranya berdasar Pancasila, tidak demikian halnya dengan pemerintah, sejarah membuktikan betapa pemerintah RI cenderung miring ke kiri ketika Nasakom dielu elukan Presiden Sukarno. Suasana

Revolusi akan menapis setiap individu sehingga nyata emas dan loyang, hingga terbukti mana yang berjalan sesuai dengan asas dan hukum tertinggi negara, dan mana yang bergeser dengan berubahnya keadaan (Chaidar, 1999: 3).

Kartosuwirjo memiliki pandangan bahwa Islam adalah agama sempurna yang memberikan aturan terhadap segala aspek, pendidikan, pengajaran baik lahir maupun batin, dari hal yang paling kecil hingga hal yang paling besar, dari mengurus masalah rumah tangga hingga mengendalikan pemerintahan. Kartosuwiryo menjadikan Islam sebagai ideology politik, dimana menurutnya setiap perjuangan politik harus berpegangan pada akidah politik, yaitu ideologi dan realistis. Kartosuwiryo juga menjelaskan bahwa suatu Negara Islam haruslah negara yang memiliki kemerdekaan dan kedaulatan penuh baik di dalam maupun di luar, secara *defacto* maupun secara *de jure* agar kekuasaan yang dibentuknya tidak di kendalikan oleh pihak dan negara manapun (Agus, 2004: 27). Menurut penulis, proklamasi ini menjadikan umat Islam di seluruh Indonesia memperoleh kemerdekaanya yang hakiki, karena telah memiliki negara dan pemerintahan yang menjalankan syariat Islam.

Selanjutnya melakukan pembentukan Tentara Islam Indonesia yang merupakan gabungan dari Hizbullah dan Sabilillah serta semua organisasi Islam lainnya di bawah pimpinan Raden Oni. Pembentukan TII dan susunannya secara lengkap terjadi pada tahun 1948 mulai dari resimen sampai kepada badan-badan perjuangan Islam. Antara lain BARIS (Barisan Rakyat Islam) dan PADI (Pasukan Darul Islam). Pada tanggal 17 februari 1948 terjadi pertempuran dengan pasukan Belanda sehingga markas TII yang sebelumnya di Cihaur dipindahkan ke Gunung Cupu (Pinardi, 1964: 57).

Pada tanggal 1-5 Mei 1948 diadakan konferensi Cijoho yang membahas bentuk-bentuk ketatanegaraan dan Cara-cara memperluas pengaruh "Negara Islam". Dan membentuk sebuah Dewan Imamah yang meresmikan para pembantu Kartosoewirjo dalam hasil sidang di Pangwedusan. Dewan Imamah terdiri dari lima kementrian yang dipimpin oleh Kepala Majelis, yaitu:

1. Majelis Penerangan di bawah pimpinan Toha Arsyad
2. Majelis Keuangan di bawah pimpinan Sanusi Partawidjaja
3. Majelis Kehakiman di bawah pimpinan K. H. Ghazali
4. Majelis Pertahanan di bawah pimpinan S. M. Kartosoewirjo

5. Majelis Dalam Negeri di bawah pimpinan Sanusi Partawidjaja
6. Majelis Komandan TII di bawah pimpinan divisi Syarif Hidayat, Kamran
7. Majelis Komandan resimen di bawah pimpinan Sunan Rahmat R. Oni (Holk, 1995: 74)

Sebagai persiapan terakhir, maka di susunlah sebuah UUD (Undang-Undang Dasar) yang disebut Qanun Azasi yang antara lain menyebutkan bahwa NII atau terkenal dengan nama Darul Islam adalah suatu negara yang berbentuk Jumhuriyah (Republik) dengan memakai hukum-hukum al-Qur'an dan Hadis sebagai landasannya. Adapun kepala negaranya di serahkan kepada pimpinan Dewan Imamah. Dengan adanya dasar pemerintahan tersebut, menjadi jelas jika Darul Islam bermaksud menggantikan kedudukan RI. Dengan pemerintahan Islam ini Kartosoewirjo berharap agar kelak seluruh wilayah Indonesia mau menerima dan mengakui Negara Islam Indonesia (Kholid, 2006: 99).

Dalam pasal 1 Negara Islam Indonesia, Negara yang di proklamirkan Kartosuwirjo adalah sebuah Republik (Jumhuriyah). Dalam Republik ini negara menjamin berlakunya syariat Islam dan akan memberi keleluasan bagi pemeluk agama lain untuk melakukan ibadahnya. Dasar hukum yang berlaku di Negara Islam Indonesia adalah hukum Islam dan hukum yang tertinggi adalah al-Quran dan Hadis Nabi. Instansi tertinggi negara itu adalah Majelis Syuroh, tapi dalam keadaan genting hak tersebut dapat dialihkan kepada Imam dan Dewan Imamah. Berdasarkan konstitusi ini, semua kekuasaan terpusat ditangan Imam yang harus seorang Indonesia asli beragama Islam. Sesuai dengan itu semua kedudukan tinggi lainnya hanya boleh diduduki oleh orang Islam (Holk, 1995: 113). Oleh karena berjalan dalam suasana perang, Darul Islam dijalankan secara darurat tetapi masih menjalankan fungsi-fungsi organisasi secara mantap, bahkan sangat rapi dalam hal dokumentasi, birokrasi dan administrasi sebagaimana yang diakui Dengel (Holk, 1995: 91)

Struktur Darul Islam yang berdasarkan MKT APNII (Angkatan Perang Negara islam Indonesia) No. 1 menjadi system administrasi dengan bentuk 5 komandemen, yakni;

1. Dewan Imamah (Kabinet) di bawah Imam diubah menjadi Komandemen Tertinggi (KT) di bawah pimpinan Panglima Tertinggi (Plm. T), dengan tugas Pimpinan Hariannya dilakukan oleh Kepala Staf Umum (KSU)
2. Divis dan wilayah yang dipimpin oleh Komandan Divisi dan Gubernur diubah menjadi: Komandan Wilayah (KWW) di abawah pimpinan Panglima Komandemen Wilayah (Plm. KW) dengan Kepala Staf Komandemen Wilayah (KSW) SEBAGAI Pimpinan Hariannya.
3. Resimen dan Karesidenan yang dipimpin seorang komandan Resimen dan seorang

Residen diganti menjadi Komandan Daerah (KD). Dalam daerah yang demikian, pimpinan militer dan politik berada di tangan Komandan Komandemen Daerah (Kmd. KD) dan Pimpinan Harian dilakukan oleh Kepala Staf Komandan Daerah (KSKD)

4. Batalyon dan Kabupaten yang dipimpin Komandan Batalyon dan Bupati selanjutnya diganti menjadi Komandemen Kabupaten (KK) yang dipegang oleh KOMANDAN Komandemen Kabupaten dan tugas Pimpinan Harisan dilakukan oleh Kepala Staf Komandemen Kabupaten (KSKK).

PADI (Pahlawan Darul Islam) dan Kecamatan yang dipimpin seorang Koamndan PADI dan Camat diganti menjadi Komandemen Kecamatan (Kmd, K. Kt) dengan tugas Pimpinan Harian pada Kepala Staf Komandemen Kecamatan (KSKKT) (Kholid, 2006: 102-103). Untuk mempermudah koordinasi, Kartosoewirjo juga membagi wilayah Indonesia berdasarkan konsep teritorial ke dalam Sapta Palagan (7 daerah perang), yaitu:

1. Komandan Perang Seluruh Indonesia (KPSI), dipimpin langsung oleh Imam dan Pangsar (Panglima Besar) APNII yang berwenang mengeluarkan “komandan umum”.
2. Komandan Perang Wilayah Besar (KPWB), terbagi menjadi 3 wilayah yang dipimpin oleh PANGLIMA Perang KPWB.
 - a. KPWB I (Jawa dan Madura) dipimpin oleh Agus ABDULLAH.
 - b. KPWB II (Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Jaya) dipimpin oleh Qahhar Muzakkar.
 - c. KPWB III (Sumatera dan kepulauan di sekitarnya) dipimpin oleh Daud Bereueh (Kholid, 2006: 103-105).
3. Komandan Perang Wilayah (KPW) sebagai daerah pecahan KWPB, yang dipimpin oleh Panglima Perang KPW (Ruslan, dkk, 1992: 36).
4. KOMPAS (Komandan Militer Pangkalan Setempat), merupakan daerah perang yang meliputi satu Karesidenan dan dipimpin seorang Koamndan Pertempuran KOMPAS.
5. Komando Perang Sub-KOMPAS, merupakan daerah yang meliputi satu Kabupaten/Batalyon dan dipimpin oleh Komandan Pertempuran Sub- KOMPAS.
6. Komando Perang Kecamatan, meliputi satu Kecamatan yang terdiri dari Kompi atau Sektor dipimpin oleh Komandan Pertempuran Sektor.
7. Komando Perang Sub-Sektor, merupakan darah perang yang meliputi satu Desa dan dipimpin oleh seorang Komandan Perang Sub-Sektor.

Untuk meraih cita-citanya dalam membentuk Darul Islam tersebut, Kartosoewirjo menyebut bahwa perjuangan dari pasukan-pasukan yaitu merupakan “Perjuangan Suci” dan untuk selanjutnya digunakanlah istilah *Jama’atul Mujahiddin*. Namun keadaan ini ternyata menggembirakan pihak Belanda dan Negara “boneka” Pasundan. Segera setelah mereka mendengar Proklamasi NII, Kartosoewirjo di undang berunding dengan Kapten Westerling membicarakan usaha-usaha saling membantu antara Darul Islam dengan APRA (Angkatan Perang Ratu Adil) di bawah pimpinan Westerling dan sebagai kekuatan utama Negara Pasundan, untuk menguasai seluruh daerah Jawa Barat dan menjadikan Bandung sebagai Ibu Kota gerakan DI/TII dan APRA (Ruslan, dkk, 1992: 38).

Selain bantuan logistik, APRA juga membantu Darul Islam dengan mengirimkan tenaga terlatih, Ch. H. Van Kleef mantan Inspektur Polisi Belanda. Van Kleef yang kemudaian berganti nama menjadi Abdul haq bergabung dengan DI/TII pada bulan februari 1951. Ia kemudian menjadi penghubung antara negara-negara asing sekaligus merupakan otak dalam setiap gerakan Darul Islam tetapi kehadiran Van Kleef di DI/TII tidak menguntungkan, bahkan ia sempat membuat suatu gerakan yang membahayakan kedudukan Kartosoewirjo, sehingga ia pun terpaksa disingkirkan dengan cara dieksekusi mati. Pihak Belanda mencoba mengajak Kartosoewirjo untuk bekerjasama namun Karto lebih memilih berjihad melawan segala pemerintahan kafir (Amak, 1962: 13).

Adanya Proklamasi Negara Islam Indonesia, jadi sangatlah jelas jika target operasi gerakan DI/TII adalah pihak Republik. Sengketa antara TII dengan TNI pun terjadi selama 13 tahun (1949-1962). Untuk membiayai sengketa tersebut, maka diberlakukan *Infaq* (cenderung bersifat pajak) terhadap mereka yang tinggal di wilayah NII. Seiring tekanan ekonomi yang semakin meningkat, maka banyak orang yang berpaling dari negara yang diproklamasikan Kartosoewirjo itu. Sang Imam pun menyebut mereka sebagai penghianat dan bisa diperlakukan sebagai musuh negara. Peperangan antara RI dan NII melahirkan beragam potret psikologis anak manusia, mulai dari yang berjuang mempertahankan masing masing negaranya, hingga “kutu Loncat” yang mengambil keuntungan dari konflik ideologis tersebut (Amak, 1962: 14).

Bahkan, banyak karomah yang tidak masuk akal terjadi dan juga banyak kisah-kisah kekejaman yang menyelimuti perjalanan dakwah mereka serta kisah-kisah lucu

menyangkut sosialisasi dan hubungan para tahanan dan narapidana Islam dengan aparat militer selama berlangsungnya masa tahanan tersebut. Ketakutan, kelucuan, humor dan kesedihan yang mereka alami bercampur-aduk menjadi satu. Namun uniknya, tidak ada satu pun yang merasa menyesal dan menyimpan dendam terhadap tentara Orde Baru. Seakan mereka menyadari bahwa tentara hanyalah alat penguasa yang bekerja tanpa kesadaran. Bahkan, karena sikap mulia para mujahidin Darul Islam selama berada dalam tahanan, tidak sedikit tentara yang kemudian simpati dan mendukung ideologi para tapol/napol (Chaidar, 1999: 15).

NII sebagai Pelindung dan Pemberontakan

Banyak kalangan yang belum memahami Islam dan Muslim. Pemimpin kaum Muslim mengatakan Islam adalah agama yang adil; namun Osama bin Laden dan teroris muslim membantai non-Muslim maupun Muslim. Penginjil Franklin Grafesor mengatakan Islam adalah agama setan dan berbagai macam tudingan bangsa barat tentang agama Islam. Menurut penulis, jauh sebelum Nusantara dijajah oleh kolonial Belanda pertikaian agama sudah menjadi makanan pokok bagi bangsa Eropa dengan misi kristenisasinya berhasil memporak-porandakan kaum agamis yang ada di Nusantara. Terbukti saat ini Indonesia masih dalam taraf negara yang masih berkembang, dimana posisi pejabat tinggi mayoritas dikuasai oleh non-Muslim dari tahun ke tahun.

Di Malangbonglah awal Kartosoewirjo mempelajari Islam. Ia berguru kepada mertuanya, Ajengan Ardiwisastra, Kiai Mustafa Kamil dari Tasikmalaya juga Kiai Yusuf Taziri dari Wanaraja, yang boleh dibilang sangat berpengaruh terhadap sikap religious Kartosoewirjo. Keakraban Kartosoewirjo dengan Kiai Yusuf Tuziri terjalin antara 1931 dan 1938, saat sang Kiai duduk dalam Dewan Sentral Partai Sarikat Islam Indonesia (PSII). Kiai Yusuf Taziri kemudian menjadi salah seorang penasehat Kartosoewirjo. Kadang Yusuf, yang berkecenderungan berat ke Tasawuf, dianggap bertanggung jawab atas kegemaran Kartosoewirjo pada mistik. Bahkan beberapa peneliti mengatakan Kiai Yusuf sebenarnya pemimpin spiritual yang sesungguhnya dari gerakan Darul Islam pada tahap permulaan, ia membantu gerakan itu dari segi keuangan dan militer (Tempo, 2011: 32).

Negara Islam Indonesia adalah sebuah negara dengan cita-cita Islam yang mulia, dimana hanya terdapat hukum-hukum Allah. Didalamnya juga terkandung sikap

toleransi antar sesama kaum seperti pemerintahan Islam pada masa Rasulullah di Madina. Hafidz Muhammad Al Ja'bari mengatakan tatanan dan prinsip gerakan ini tidaklah keluar dari tuntunan Allah dan rosulNya serta hal-hal yang pernah dilaksanakan oleh para sahabat rasulullah saw dan yang mengikuti mereka dalam kebaikan. Undang undang negaranya adalah syariat Allah dan kekuasaan mutlak adalah pada syari'at Islam (Chaidar, 1999: 1).

Islam dan politik memang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Islam dan politik terdapat kolerasi fungsional, Islam memerlukan dukungan politik sementara politik membutuhkan moral dan etika Islam. Hubungan antara Islam dan politik paling tidak dapat dilihat dari dua hal. Pertama, dari sisi Islam sebagai doktrin, terdapat beberapa ungkapan alQur'an yang sering ditafsirkan sebagai konsep politik menurut Islam. Kedua, hubungan Islam dan politik dapat ditelusuri dalam masyarakat Islam sebagai realitas sosial. Misalnya: kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi (QS. 5, al-Maidah: 17-18), dipahami bahwa seluruh kekuasaan, termasuk kekuasaan politik menurut Islam berada pada tangan Allah, kekuasaan itu kemudian dilimpahkan kepada manusia sebagai khalifah (QS. 2, al- Baqarah: 30). Ungkapan 'ulil amri (QS. 4, an-Nisa: 59) menunjukkan perlunya pemerintahan dalam masyarakat. Sejak itu , Islam atau tepatnya masyarakat Islam tidak dapat dipisahkan dengan politik yang *inherent* dengan masyarakat itu sendiri (Wahyuddin, 2016: 71).

Secara teori umat Islam percaya bahwa ajaran Islam itu meliputi seluruh dimensi kemanusiaan. Dengan kata lain apa yang disebut masalah sekuler, dimata seorang muslim tidak dapat dipisahkan dengan persoalan imannya. Dari sudut pandang ini, cita-cita kekuasaan politik menyatu dengan wawasan moral sebagai pancaran dari imam seorang muslim. Politik, dengan demikian tidak dapat dipisahkan dari ajaran etik yang bersumber dari wahyu (Wahyuddin, 2016: 72). Dalam hal ini, menurut penulis gerakan Kartosoewirjo telah terindoktrinasi sebagaimana ia menerapkan konsep politik Islam dalam metode perjuangannya mendirikan Negara Islam yang berlandaskan al-Qur'an dan Hadis dengan keyakinan imam dan pengetahuan Islam yang ia miliki bahwa gerakannya adalah gerakan yang mulia dengan konsep dasar negara Islam Indonesia akan mengembalikan kejayaan Islam yang semula.

Persahabatan dan permusuhan menjadi sangat relatif berhadapan dengan kepentingan memenangkan perjuangan. Pribadi besar S.M. Kartosoewirjo yang pernah

menjabat sebagai wakil Presiden PSII, yang menuliskan Brosur Sikap Hijrah sebagai arah jihad PSII, akhirnya dipecat oleh karena PSII memilih untuk meninggalkan “sikap hijrah” itu dan bergabung dengan Gabungan Partai Politik Indonesia lainnya guna menempuh kemerdekaan lewat jalur politik kooperatif. Akhirnya sikap konsisten pribadi besar S.M Kartosoewirjo mendorongnya untuk membuktikan sendiri apa yang digagaskannya bersama para ulama yang istiqamah dan membangun institut suffah, mempersiapkan kader negarawan yang ulama dan ulama yang negarawan, yang menjadi cikal bakal mujahid awal Negara Islam Indonesia (Chaidar, 1999: 3).

Negara Islam Indonesia ciptaan Kartosoewirjo mendatangkan keresahan bagi pemerintah Republik Indonesia yang secara terang-terangan melawan pemerintahan yang sah, akibat dari perlawanan ini ia bersama dengan kelompoknya dikatakan sebagai pemberontak karena sikap radikal yang menghalalkan segala macam cara dalam mencapai tujuannya. Bagi Soekarno (Presiden Indonesia) motif pendirian Negara Islam Indonesia adalah untuk menggulingkan kepemimpinannya dan Kartosoewirjo naik tahta menjadi penguasa. Sementara isu percobaan pembunuhan Presiden juga tersebar akan tetapi hal ini di bantah oleh Kartosoewirjo (Tempo, 2011: 29). Adapun menurut penulis, sejarah adalah milik pihak pemenang, di dalam berbagai buku dan literatur-literatur mengenai gerakan ini menunjukkan gerakan radikal yang tidak berprrikemanusiaan, membantai dan meneror warga yang tidak mengakui negar Islam atau di bawah naungan pemerintah republik Indonesia (Tempo, 2011: 39).

Bagi masyarakat Jawa Barat, keputusan Renville dan ditariknya pasukan Siliwangi ini menandakan terputusnya perlindungan dari RI, maka mereka disudutkan pada suatu keadaan dimana harus berdiri sendiri (Tempo, 1981: 209). Keadaan seperti ini, merupakan suatu keuntungan bagi Kartosoewirjo untuk menyiapkan pemerintahan tandingan. Langkah cepat pun ditempuh, pada tanggal 10-11 Februari 1948, sebanyak 160 wakil- wakil organisasi Islam masih bertahan di Jawa Barat. Yakni kamran (Komandan Teritorial Sabilillah), Sanusi Partawidjaja (Ketua Masyumi Priangan), R. Oni (Pemimpin Sabilillah Priangan), Dahlan Lukman (Ketua GPII), Siti Murtadji'ah (Ketua puti GPII), Abdul Ridwan (Ketua Hizbullah Priangan), dan Pertahanan Umat Islam Bandung (2 orang), Sumedang (2 orang), Tasikmalaya (3 orang), dan Ciamis (3 orang). Untuk berjuang bersama dalam misi pembentukan Negara Islam Indonesia (Holk, 1995: 65-66).

Meskipun gerakan ini dianggap pemberontak oleh Pemerintah namun bagi rakyat Malangbong gerakan ini menjadi pelindung bagi keselamatan masyarakat Jawa Barat yang telah diterlantarkan oleh republik Indonesia. Terutama pada saat republik Indonesia menyetujui perjanjian Renville tanpa perlawanan, dimana pihak republik Indonesia harus mengosongkan wilayah-wilayah yang dikuasai TNI untuk dikuasai oleh Belanda. Sementara Kartosoewirjo memilih bertahan melakukan perlawanan bersenjata dan berjuang menyerukan Jihad dengan menggerakkan pasukan *Hizbu'llah* dan *sabi'lillah* yang merupakan cabang bersenjata dari partai besar Islam, Masyumi. Indonesia (Dijk, 1983: 11).

Melihat proses pembentukan Negara Islam di Indonesia itu, Bachtiar Efendy menilai Kartosoewirjo tak memilih landasan ideology yang kuat apalagi mengingat latar belakangnya sebagai anak manteri candu yang berpendidikan Belanda, dan hanya belajar Islam secara otodidak. “Soekarno jauh lebih kuat pengetahuan keislamannya” Bahtiar menunjuk kekecewaan Kartosoewirjo terhadap perjanjian Renville dan perjanjian-perjanjian berikutnya yang dianggap merugikan Indonesia sebagai factor yang lebih menentukan pemberontakannya. Tatkala pemerintahan Soekarno-Hatta terdesak karena agresi militer Belanda, Kartosoewirjo memanfaatkan moment itu untuk memproklamasikan NII. Pendapat ini disanggah Sardjono Kartosoewirjo. Menurut dia, perjuangan ayahnya berlandaskan ideology Islam yang diperjuangkan sejak ia mulai bergabung dengan Sarekat Islam dengan tokoh seperti H.O.S Tjokroaminoto. “Perjanjian Renville hanya momentumnya” (Tempo, 2011: 47).

Tidak ada angka pasti tapi diperkirakan lima puluh ribu orang menjadi anggota ketika Kartosoewirjo di tangkap. Kepada pengikutnya, Karto selalu mengobarkan semangat Jihad dan memerangi “Pemerintahan Kafir”. Bagi Kartosoewirjo, kekosongan kekuasaan di Jawa Barat berarti peluang mendirikan Negara Islam. Puncaknya, pada tanggal 7 Agustus 1945, di desa Cisampah, kecamatan Ciawiligar, Kawdanan Cisayong, Tasikmalaya, Kartosoewirjo mendeklarasikan Negara Islam Indonesia (Tempo, 2011: 48).

SIMPULAN

Kartosoewirjo adalah tokoh pemimpin sejak periode kebangkitan nasional yang tumbuh dan tampil sebagai pemimpin organisasi politik PSII. Setelah proklamasi kemerdekaan, tokoh ini tampil sebagai tokoh Islam dan menjadi ketua partai Masyumi di Jawa Barat. Ia adalah

seseorang pemimpin Islam dengan pengaruh dan kekuatan yang tidak dapat diabaikan. Kepribadian Kartosoewirjo sangatlah menarik. Ia senantiasa hidup dalam suasana yang sederhana. “Sebagai seorang tamatan ELS dan ‘potolan’ sekolah dokter, sebenarnya ia bisa hidup cukup baik, kalau saja mislanya ia mau menjadi seorang pegawai pemerintah atau bekerja di suatu kantor perusahaan. Kartosoewirjo sepanjang perjuangan hingga penghabisan darahnya ia tidak pernah menyesal sedikitpun, karena usia dan melemahnya tubuh beliau yang tidak memungkinkan lagi untuk melakukan perlawanan hingga akhirnya ia memilih untuk menyerah dan berkata ingin segera menghadap kepada Tuhan. Walaupun sang Imam di vonis hukum mati dan kematiannya menandai berakhirnya Negara Islam Indonesia namun, sampai saat ini cita-cita keislaman masih kuat, tahun ke tahun terus saja ada gerakan untuk mewujudkan khilafah Islam. Sebuah sistem pemerintahan konkrit yaitu Daulah Islamiyah.

Situasi pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Soekarno dan Hatta. Sebagai bangsa yang baru merdeka timbulnya pergolakan politik, ekonomi dan perdebatan dasar negara secara garis besar mulai sejak proklamasi 17 Agustus 1945, dengan perjuangan fisiknya sampai pada perjuangan diplomasi. Perundingan Hoge Veluwe Belanda-Indonesia tahun 1946 yang menghasilkan pengakuan *de facto* atas RI (Pulau Jawa saja), pertempuran Surabaya, perjanjian Linggarjati tanggal 25 Maret 1947 yaitu Belanda mengakui secara *de facto* atas Jawa dan Sumatera, juga RI akan menjadi Negara Serikat Indonesia, perjanjian Renville tanggal 17 Januari 1948, perang kemerdekaan I (1947) dan II (1948), Roem-Royen tanggal 7 Mei 1949, hingga akhirnya ditutup dengan persetujuan KMB di Den Haag (Belanda).

Di tengah krisis pada tahun 1957 Soekarno memperkenalkan ‘demokrasi terpimpin’ suatu sistem di mana seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara. Para pemimpin lainnya bergabung dengannya untuk mempertahankan posisi sentralnya. Akan tetapi, semuanya ini adalah untuk mendukung suatu keseimbangan politik yang merupakan kompromi antar kepentingan-kepentingan yang tidak dapat dirujuk kembali dan oleh karenanya tidak memuaskan semua pihak. Janji dari demokrasi terpimpin tersebut adalah suatu janji kosong. Inilah yang mempengaruhi munculnya gerakan perlawanan diluar konstituante, ada yang menyerang melalui parlemen dan ada pula dalam tindakan yang radikal.

Negara adalah bentuk konkrit dari kekuatan dan kekuasaan itu. Kekuasaan itu sangat ajaib. Kita bisa berbuat apa saja dengan kekuasaan. Namun hanya kekuasaan yang berdasarkan Islam sajalah yang dapat dijamin akan memuaskan semua orang. Kartosoewirjo terkenal dengan jiwa kepemimpinan dan wataknya yang keras dalam mencapai ambisinya. Ia menghabiskan sisa umurnya berjuang bergerilya untuk menyelamatkan daerah wilayahnya untuk tidak dikuasai lagi oleh penjajah. Keputusan Republik Indonesia yang menandatangani perjanjian Renville awal mula

gerakan Kartosoewirjo secara terang-terangan melawan pemerintah republik Indonesia. Pada tanggal 7 Agustus 1949 Kartosoewirjo memproklamkan Negara Islam Indonesia. Lahirnya NII ini kemudain membawa dua program utama, yaitu menyadarkan manusia bahwa mereka hamba Allah dan menegakkan *Khalifa fil Ardhi*. Lalu akhirnya ia menyerukan Jihad, meneror masyarakat yang tidak mengakui negara Islam, melawan Tentara Nasional indonesia, tidak sedikit jumlah korban yang terdapat pada masa pemberontakan Kartosoewirjo. Gerakan ini tercatat dalam sejarah pemberontakan Indonesia namun pengaruh gerakan ini mencakup beberapa daerah yakni, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan, Sulawesi Selatan, dan Aceh yang secara sah mengaku sebagai bagian dari pemerintahan Islam Kartosoewirjo.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurahman Dudung, *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*. Cet. 1; Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2011.
- Abdurahman Dudung, *Metodologi Penelitian Sejarah*. Cet. 1; Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Al-Chaidar, *Pemikiran Politik Plokamator Negara Islam Indonesia: S.M. Kartosoewirjo*. Cet, 1; Jakarta: Darul Fallah,1999.
- Anshori A Yani, *Tafsir Negara Islam*. Yogyakarta: Siyasat Press, 2008.
- Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. EdisiRevisi Cet, 1; Jakarta: Rineka Cipta,2010.
- Ausop Zainal Asep, *Ajaran dan Gerakan NII*. Bandung: Tafakur,2011.
- Cahyadi T.Noor, *Relasi Islam dan Negara: Studi atas pemikiran kenegaraan M. Natsir dan S.M Kartosoewirjo*. Yogyakarta: Darul Fallah,2009.
- Dengel Holk A, *Darul Islam dan Kartosoewirjo*. Cet, 1; Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,1995.
- Dewan Syariah Daulah Islam Irak, *Deklarasi Daulah Islam Irak*. Cet. 1; Solo: Media Islamika,2007.
- Dijk Van, *Darul Islam Sebuah Pemberontakan*. Cet. 1; Jakarta: Grafiti Pers, 1983.
- Hadikusumo Ki Bagus, *Islam sebagai Dasar Negara dan Akhlak Pemimpin*.Yogyakarta: Pustaka Rahayu, 1954.
- Hamka, *Pribadi*. Cet. 8; Jakarta: Bulan Bintang, 1982.
- Irfan S. Anwar, *Trilogi kepemimpinan Negara Islam Indonesia*. Yogyakarta, Uswah, 2008.
- Iqbal Muhammad, *Fiqih Siyasah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

- Jackson Karl D, *Kewibawaan Tradisional: Islam dan Pemberontakan*. Cet. 1; Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1990.
- Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara: Prespektif Modernis dan Fundamentalis*. Magelang: Indonesia, 2001.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. "Edisi yang disempurnakan", jilid 9, Juz I, Jakarta: P.T Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*. Cet. 2; Jakarta: Aksara Baru, 1980.
Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*. Cet. 1; Yogyakarta: Benteng Budaya, 1995. Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*. Cet. 2; Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003.
- Kurasawa, *Mobilisasi dan Kontrol*. Jakarta: PT Gramedia, 1993.
- Khamani Zada, *Islam Radikal: Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras di-Indonesia*. Jakarta: Teraju, 2002.
- Santosa Kholid, *Jejak-jejak Sang Pemberontak: Pemikiran, Gerakan dan Ekspresi Politik S.M Kartosoewirjo dan Daud Bereueh*. Bandung: Segi Arsy, 2006.
- Leirissa, *Menelusuri Jalur Linggarjati*. Jakarta: Grafiti, 1992.
- M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*. Cet 8; Yogyakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2005.
- M.C. Ricklefs, *Mengislamkan Jawa*. Cet. 1; Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2013.
Natsir Muhammad, *Islam Sebagai Dasar Negara*. Jakarta: DDI dan Media Dakwah, 2000.
- Nasution Harun, *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran*. Jakarta: Mizan, 2000.
Pinardi, *Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo*. Cet. 1; Jakarta: Aryaguna, 1964.
- Poerwardaminata, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. 4; Jakarta: Balai pustaka, 1980.
- Rahmat dkk, *Praktek Penelusuran Sumber Sejarah dan Budaya*. Cet. 1; Jakarta: Gunadarma Ilmu, 2016.
- Ruslan dkk, *Mengapa Mereka Memberontak*. Yogyakarta: Bio Pustaka, 2008. Subakti Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 1992.
- Susan Blackburn, *Jakarta Sejarah 400 tahun*. Cet. 1; Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2011.
- Shihab Quraish, *Menabur Pesan Ilahi*. Cet. 1; Jakarta: Lentera Hati, 2006.
- Kartosoewirjo, "*Sedikit Tentang Oelil Amri*". Fadjat Asia, 24 Mei, 1930.

SjadzaliMunawir, *Islam dan Tata Negara*. Cet. 2; Jakarta: Universitas Indonesia, 2002.

Sjarifuddin Amak, *Kisah Kartosoewirjo dan Menyerahnja*. Surabaya: Grip, 1962.
Syamsuddin M. Din, *Usaha Pencarian Konsep Negara Dalam Sejarah Pemikiran Islam Dalam Ulumul Qur'an*. Vol IV no.2, Jakarta: 1993.

Tempo, *Kartosoewirjo Mimpi Negara Islam*. Cet. 1; Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia, 2011.

Yahya A. Muhaimin, *Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia 1945-1966*. Yogyakarta: Gadjah Mada University, 1982.

Sumber Jurnal:

Barsihannor, *Pemikiran Abu Al-A'la Al-Maududi*. Jurnal Adabiyah, vol. 8, no. 2 (2013)

Abd.Rahim Yunus, *Posisi Negara Dalam Penegakkan Syariat Islam dalam Perspektif Sejarah*. Jurnal Adabiyah, vol. 16, no. 2 (2016)

Sopyan Hadi, *Negara Islam Indonesia*. Journal of Qur'an and Hadit Studies vol 2, no.1 (2013)

Wahyuddin, *Relasi Islam dan Politik di Indonesia: Perdebatan Seputar Ideologi dan Konstitusi Negara Indonesia Merdeka*. Jurnal Adabiyah, vol. 16, no. 1 (2016)

Sumber Internet:

<https://hukumallah.wordpress.com//dalil-dalil-yang-mewajibkan-khilafah>. Di akses pada tanggal 25 Juni 2019, pukul 23:00 WIB